

ETNIK KURDI IRAN DAN REVOLUSI ISLAM 1979 M

Faiz Nasrullah*

Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Abstract

The politics of discrimination applied by the Iranian government both politically and religiously became the beginning of the emergence of the Kurdish resistance movement towards political policies, one of which resistance arose after the 1979 Iranian revolution. This writing aims to analyze the ethnic conditions of Iran's Kurds after the 1979 Iranian Revolution. Historical methods, Political approach as well as descriptive-analysis can be concluded that the existence of the Iranian revolution did indeed result in victory in the struggle against the Shah Reza Pahlevi regime and carried Islamic symbols. However, in reality the victory brought a separate problem for the early administration in Iran due to the emergence of several ethnic communities in the Iranian region who wanted a concession in the form of cultural autonomy and political concessions on the national scene.

Keywords: Kurdish Ethnicity; Minority; Iran; Islamic Revolution.

Abstrak

Politik diskriminasi yang diterapkan oleh pemerintah Iran terhadap etnik Kurdi baik dalam hal politik maupun agama menjadi awal bermunculannya gerakan resistensi masyarakat tersebut terhadap kebijakan politik negara yang salah satu perlawanan itu muncul setelah revolusi Iran 1979. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa kondisi etnik Kurdi Iran setelah terjadinya Revolusi Iran 1979 menggunakan metode sejarah, pendekatan politik dan juga deskriptif-analisis dapat disimpulkan bahwa adanya Revolusi Iran memang menghasilkan kemenangan dalam perjuangan melawan rezim Syah Reza Pahlevi dan membawa simbol-simbol keislaman. Namun, kenyataannya kemenangan tersebut membawa satu masalah tersendiri bagi pemerintahan awal di Iran dikarenakan adanya kemunculan beberapa komunitas etnik di wilayah Iran yang menginginkan konsesi berupa otonomi secara budaya dan juga konsesi politik dalam kancah nasional.

Kata Kunci: Etnik Kurdi; Minoritas; Iran; Revolusi Islam.

PENDAHULUAN

Etnik Kurdi tampaknya lebih jauh dari otonomi atau kemerdekaan hari ini daripada di masa lalu. Sebagian penyebabnya terletak pada perpecahan mereka dalam bahasa, perilaku agama, dan terutama struktur kesukuan. Pembagian wilayah inti mereka di antara Turki, Iran, dan Irak setelah Perang Dunia Pertama memberikan mereka pada satu arus utama yang bermuara pada nasionalisme kesukuan. Meskipun ada sedikit prospek baru untuk otonomi atau kemerdekaan di tiga negara ini, keluhan ekonomi kemungkinan akan terus menumbuhkan rasa identitas etnik di antara etnik tersebut.

Tantangan mengenai otonomi ataupun kebebasan di beberapa pemerintahan di Timur Tengah membuat trauma Turki, Iran, Iraq dan Syiria sejak awal perjanjian Sykes-Picot dan terus berlanjut hingga hari ini. Dari pemberontakan Agha Simko di Iran hingga perjuangan PKK di Turki saat ini, pertanyaan tentang Kurdi yang ingin wilayah sendiri tetap menjadi kelemahan beberapa pemerintah di atas menjadi semakin sulit untuk mengasimilasi minoritas dengan kesadaran etnik dan politik yang meningkat dalam beberapa dekade terakhir ditambah iklim geopolitik Kurdi telah sangat aktif dalam beberapa tahun terakhir. Etnik Kurdi di Suriah, Irak dan Turki telah mengalami transformasi besar. Bentuk dan sifat politik Kurdi di masing-masing negara telah berubah secara dramatis dalam hitungan bulan belakangan. Mereka

*Correspondance Author: touyama01@tempr.email

Article History | Submitted: February 21, 2020 | Accepted: June 16, 2020 | Published: July 20, 2020

How to Cite (APA 6th Edition style):

Nasrullah, Faiz. (2020). Etnik Kurdi Iran dan Revolusi Islam 1975 M. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 1-9.

DOI: [10.30829/juspi.v4i1.6949](https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.6949)

mampu menunjukkan adanya sebuah upaya untuk memperoleh otonomi dengan memasuki bidang politik di beberapa negara itu.

Dalam hal ini etnik Kurdi di Iran menjadi masalah bagi rezim yang memerintah di Iran dikarenakan mereka selain membantu menentang dan menggulingkan pemerintahan dinasti Pahlevi, mereka juga menginginkan adanya kemerdekaan secara otonom setelah Republik Islam Iran berdiri, walaupun ini tidak lepas dari pengaruh geopolitik di sekitarnya juga. Contohnya Republik Kurdi Mahabad yang muncul pada tanggal 22 Januari 1946 dirangsang dan difasilitasi oleh Soviet telah berakhir setelah pendudukan Soviet pada masa perang di bagian utara negara itu pada tahun 1946, maupun pada pembentukan *Kurdistan Regional Government* di Irak yang mulai beroperasi saat Saddam jatuh pada tahun 2003, pembontakan *Partiya Kurdistan Kakeren* atau Partai Pekerja Kurdistan di Turki dan terakhir munculnya milisi Kurdi dalam peristiwa *Arab Spring* di Syria.

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Penulisan ini adalah penulisan sejarah, oleh karenanya metode yang digunakan pun adalah metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis-analisis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Metode sejarah bertumpu pada beberapa langkah yaitu, pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi) dan penulisan sejarah (historiografi). Penulisan ini bersifat deskriptif dengan jenis *library research*, yaitu penulisan yang mengacu pada sumber tertulis, dengan mencari data dari tulisan-tulisan yang mendukung penulisan. Penelitian ini memfokuskan pada peristiwa Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 dan dampaknya terhadap komunitas etnik kurdi di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etnik Kurdi merupakan etnik yang mendiami daerah Kurdistan yang terletak di daerah pegunungan di perbatasan Iran, Irak, Turki dan Suriah. Secara tradisional mereka hidup secara berpindah-pindah dari daerah di sekitar *Greater Kurdistan*. Akan tetapi, pasca-Perang Dunia I negara-negara pemenang perang menetapkan garis perbatasan bagi negara-negara baru yang menyebabkan *Greater Kurdistan* menjadi terpecah. Konsekuensi dari perjanjian ini adalah terpecahnya wilayah dan jumlah etnik Kurdi yang semula bersatu kemudian menjadi terpisah dan berada dibawah pengawasan negara Timur Tengah modern seperti Irak, Iran, Suriah dan Turki (Romano & Gurses, 2014, p. 134).

Permasalahan etnik Kurdi di Timur Tengah setelah Perang Dunia I berkisar tentang adanya minoritisasi baik secara agama dan budaya, permasalahan wilayah yang berdiri sendiri dan juga bahasa serta budaya yang berbeda dengan mayoritas penduduk negara-negara di atas. Turki dan Iran entah dengan tidak ataupun sengaja menolak keberadaan kolektif etnik Kurdi baik nasional dan secara budaya serta menganggap budaya mereka memusuhi dan membahayakan identitas nasional negara-bangsa Turki atau Iran. Namun, justru karena ada pengecualian bagi Kurdi di Irak dengan berdirinya *Kurdistan Regional Government* dan penolakan keberadaan

mereka sebagai entitas etnik secara nasional di Turki dan Iran yang membuat gerakan nasional Kurdi menjadi bangkit (McDowall, 2010, p. 161).

Di Turki, pemerintah telah berusaha untuk menyangkal keberadaan mereka sebagai orang yang terpisah. Sementara para pemimpin Kurdi dapat mengeksploitasi sistem multi-partai untuk membangun basis kekuatan local namun mereka harus menghindari agitasi terbuka. Di Irak, langkah militer Barzani pada akhirnya dihancurkan oleh pemerintah pusat selama masa Saddam. Di Iran, setelah pendudukan USSR pada masa perang di bagian utara negara itu berakhir pada tahun 1946 dan Republik Kurdi Mahabad yang telah dirangsang dan difasilitasi oleh Soviet telah runtuh. Shah Reza Pahlevi mempertahankan kontrol politik yang ketat namun tetap mengizinkan ekspresi budaya minoritas tersebut beberapa tahun sebelum terguling.

Runtuhnya otoritas negara tahun 1979 M telah memungkinkan kecenderungan etnik dan agama yang mencari otonomi (khususnya di Kurdistan dan Azerbaijan) untuk mempraktikkan bentuk pemerintahan federal secara *de facto*. Bersama-sama, gerakan-gerakan ini mewujudkan tantangan keadilan sosial yang mendasar, mengajukan pertanyaan apakah negara-bangsa revolusioner Iran dapat bertahan bersama secara demokratis. Tanggapan positif berarti pembagian kekuasaan pasca-revolusioner di daerah otonom dan di seluruh negeri dengan berbagai partai politik, termasuk partai Kurdi KDPI (*Kurdish Democratic Party of Iran*) dan Azeri yang berhaluan kiri dan otonom. Namun pemerintah Iran yang baru menolak opsi ini dan membuat rancangan konstitusi Republik Islam yang direvisi berdasarkan *Velayat-e Faqih* (Perwalian Ahli Hukum) menginvestasikan kekuatan pamungkas negara di tangan elit ulama terpilih (Ahmadzadeh & Stansfield, 2010, p. 199).

Kurdi Iran di era Pahlavi

Menyusul jatuhnya dinasti Qajar dan ketika pemimpin Brigade Cossack Reza Shah membuat gerakan untuk mendirikan pemerintahan baru di Iran yang aman dari kekuasaan kesukuan, ia menciptakan militer yang kuat untuk meleraikan pertengkaran kesukuan di Iran yang telah menciptakan lubang besar dalam politik Qajar dan membuat mereka tunduk pada pemerintahan baru. Menyusul kemenangan militer ini terhadap suku-suku tersebut, Reza Shah menerapkan kebijakan terhadap suku-suku tersebut dengan cara yang akan menjamin berakhirnya kerusuhan suku di negara itu. Kebijakan itu diikuti dan diterapkan oleh militer di semua wilayah kesukuan, termasuk wilayah Kurdi, yaitu dengan cara penyitaan tanah milik kesukuan di seluruh Iran, pemerajaraan atau pengasingan secara internal para pemimpin dan tokoh suku, memaksa pemukiman seluruh masyarakat berada di tanah milik suku dan tidak boleh mendirikan pemukiman tradisionalnya di tanah lain, penutupan perbatasan, dan pencegahan migrasi kawanan suku baik yang nomaden maupun semi menetap (Koochi-Kamali, 2014, p. 67).

Di bawah Reza Shah, keseimbangan antara pusat dan pinggiran, dan akomodasi elit kesukuan yang kuat tidak ada lagi. Sebagai gantinya, ia memprakarsai serangkaian ekspedisi militer ke provinsi-provinsi negara itu dalam upaya untuk memaksakan surat perintah pemerintah pusat di daerah di luar Tehran. Kebijakan Reza Shah tidak

hanya akan memaksakan secara keseluruhan Iran menerima model nasionalisme baru, namun juga akan mempercepat proses pembentukan kohesif di antara bangsa Kurdi terhadap identitas nasional mereka sendiri, sebagai tanggapan, atau reaksi, terhadap ancaman yang diajukan kepada mereka oleh pihak yang kuat kekuatan sentralisasi sekarang sedang dikerahkan oleh Shah yang baru (Kreyenbroek & Sperl, 2005, p. 17).

Ini diperkuat oleh pendidikan yang diperkenalkan Reza Shah sebagai alat yang paling kuat secara ideologis dalam penyebaran resmi tentang karakter nasionalis dalam identitas masyarakat Iran yang baru. Ia juga membangun sekolah dan kurikulum nasional yang baru dikerahkan untuk menciptakan rasa identitas nasional pada generasi baru, yang nantinya juga berfungsi sebagai fungsionaris atau pegawai negara di era Pahlavi. Namun, baik tentara nasional yang baru maupun pendidikan nasional yang baru tidak dapat berfungsi tanpa bahasa resmi yang seragam, sehingga muncul dominasi bahasa Persia, yang telah dideklarasikan sebagai bahasa resmi Iran, kini diperkuat oleh dukungan negara terhadap pelarangan atas semua bahasa lain yang digunakan di Iran.

Selama masa pemerintahan Reza Shah (1925 - 1941), bahasa tersebut dilarang untuk penggunaan umum tetapi putranya, Shah Reza Pahlevi (1941 - 1979), agak mengendurkan kebijakan asimilasi terhadap minoritas. Misalnya, publikasi terbatas dan penyiaran yang dikelola negara diizinkan masuk ke wilayah etnik kurdi, tetapi publikasi berbahasa Kurdi sebagian besar masih terbatas pada domain pribadi dan non-resmi. Untuk sebagian besar perlakuan Kurdi di Iran ini, yang telah disebut "toleransi yang dibatasi dan dikendalikan", berlanjut di Republik Islam Iran (Taucher et al., 2015, p. 85).

Inggris dan Uni Soviet yang menduduki Iran barat pada bulan Agustus 1941 melalui daerah-daerah tertentu, memaksa Reza Shah yang tampaknya pro-Jerman untuk turun tahta dan meninggalkan negara itu dan pada bulan berikutnya mereka membiarkan putranya, Shah Reza Pahlevi naik takhta. Pendudukan Inggris dimaksudkan untuk melindungi sisi timur Irak, berpusat di daerah Kerrmanshah. Rusia menduduki sebagian besar Azerbaijan utara dan barat dengan daerah Ushnaviya ke Miandoab. Kondisi ini tentu saja meninggalkan kekosongan bagi masyarakat etnik Kurdi Iran terutama di wilayah Mahabad hingga Saqiz yang tentunya memperkuat para elite kesukuan dan melemahkan pemerintah dalam negeri Iran yang telah dinilai merendahkan martabat suku mereka (Eppel, 2016, p. 17).

Kondisi ini dimanfaatkan oleh elite Kurdi dengan lahirnya sebuah republik yang disebut dengan Republik Mahabad yang berdiri sekitar setahun terhitung dari tahun 1946 atas dukungan dari Uni Soviet menggunakan politik kesukuan yang ada pada etnik Kurdi. Republik otonomi ini sebenarnya adalah produk dari politik Soviet untuk mengganggu dominasi kekuatan barat di Timur Tengah. Republik ini lahir dengan produk Soviet lainnya yaitu republik rakyat Azerbaijan. Republik ini juga membentuk suatu angkatan bersenjata pada tahun 1945 yaitu *Kurdish Democratic Party of Iran* (KDPI), yang dibentuk saat Reza Pahlavi serta sekutu-sekutunya yaitu Amerika dan Inggris mencoba untuk menekan mereka dikarenakan pemerintahan Kurdi Iran tersebut terbentuk dari kekuatan Soviet. Wilayah otonomi tersebut

berakhir dengan terpinggirkannya etnik Kurdi oleh pemerintah pusat Iran mengikuti penarikan pengaruh Soviet dari Iran (Romano, 2006, p. 200).

Berbeda dengan ayahnya, Shah Reza Pahlevi secara efektif menggunakan “masalah Kurdi” sebagai tekanan pada stabilitas domestik Irak dan Persatuan Arab, untuk membuat Irak lemah, terpecah, dan terpisah dari Nasser, serta untuk "meringkas dua pertiga dari tentara Irak dan melenyapkan simpatisan partai Baath untuk melancarkan sabotase terhadap pemerintahan Irak. Ketika dukungan untuk Kurdi Irak tumbuh berkat dukungan pemerintah Iran, nasionalisme Kurdi di Kurdistan Iran melambat dan, sebagai gantinya, mendorong Barzani untuk meninggalkan idenya berpihak pada Kurdi Iran melawan Teheran, karena ia tidak ingin kehilangan dukungan strategis Iran dalam melawan Irak (Reisinezhad, 2018, p. 250).

Kurdi Iran pada Era Revolusi Islam 1979

Pada 1978-1979, protes meluas terhadap monarki Pahlavi yang memuncak pada penggulingan Shah Reza Pahlevi dan kelahiran Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Khomeini. Banyak etnik minoritas mendukung Revolusi dan berharap bahwa perubahan rezim akan mengarah pada penghormatan yang lebih besar terhadap hak dan aspirasi mereka termasuk etnik Kurdi. Namun setelah beberapa saat perjuangan mengusir rezim lama menjadi jelas ketika Khomeini mengumumkan tidak berniat memberikan otonomi yang lebih besar kepada minoritas Iran (Kreyenbroek & Sperl, 2005, p. 18).

Mereka terutama yang berasal dari etnik Kurdi Sunni merasa bahwa perpolitikan Iran yang berada di tangan para pemuka agama yang berlatar belakang Syiah menjadi langkah yang berbahaya bagi mereka etnis Kurdi yang Sunni di Iran dan beberapa sub suku lain berusaha untuk merundingkan hal tersebut. Mereka menginginkan porsi yang sama dalam hal politik, ekonomi, dan juga keagamaan untuk mereka seperti yang dilakukan oleh pemerintah Iran terhadap etnik Kurdi Syiah.

Namun hal ini langsung ditanggapi oleh Khomeini sebagai langkah yang membahayakan keamanan negara dan juga revolusi Iran yang baru berjalan beberapa bulan. Apalagi kebanyakan dari etnik Kurdi Sunni ini hidup di sepanjang garis perbatasan Iran-Iraq, sehingga rawan untuk dimanfaatkan oleh negara lain dan yang terakhir daerah yang ditinggali oleh mereka di Iran adalah daerah yang sangat jauh berbeda dengan daerah etnik Kurdi Syiah di Iran sehingga dapat dipahami bahwa adanya kecemburuan ekonomi yang dirasakan oleh mereka sehingga rezim baru Teheran segera ditantang oleh pemberontakan (Ehteshami, 1995, p. 200).

Kerusuhan yang terjadi kemudian di wilayah Kurdi, Khuzestan mayoritas-Arab dan wilayah Turkmen (yang berbahasa Turki) di timur laut memunculkan berbagai aksi protes yang dijawab dengan dengan aksi militer yang menentukan dari pemerintah baru Iran. Akibatnya, periode sejak Revolusi Islam telah ditandai oleh ketegangan berulang antara pemerintah dan berbagai kelompok etnik Iran, ketika upaya yang terakhir untuk memobilisasi mendukung hak-hak yang lebih besar dan bahkan otonomi sebagian besar telah dipenuhi oleh kekerasan dan penindasan.

Bagi orang-orang Kurdi, mereka berharap bahwa pemerintah baru akan mengakui hak-hak mereka dan membiarkan mereka ada sebagai entitas otonom di Republik baru tersebut. Namun, situasinya tidak bertahan lama. Pada awalnya, pemerintah Iran awal hanya tidak cukup kuat untuk menegaskan kembali kewibawaan militer mereka di wilayah yang didominasi orang Kurdi. Selama periode awal ini, para pemimpin Rusia bahkan terlibat dengan rezim baru, dengan membuat Ghasamlu seorang wakil dari Kurdi terpilih untuk Majelis Ahli pada Agustus 1979.

Namun dikemudian hari, Khomeini menolak perbedaan etnik di kalangan umat Islam dan ini secara khusus merujuk pada permintaan beberapa orang dari berbagai suku minoritas di Iran yang menginginkan otonomi. Meskipun demikian, Konstitusi Republik Islam memang mengakui adanya keragaman bahasa di antara orang-orang Iran. Dalam Pasal 15 Konstitusi, bahasa Persia diakui sebagai bahasa resmi negara. Semua komunikasi resmi harus dalam bahasa Persia. Selain itu, banyak pemimpin Islam Sunni di Iran menentang penetapan Islam Syiah sebagai agama resmi negara dalam konstitusi baru. Menurut Ayatollah Hossein Ali Montazeri, yang saat itu ketua Majelis Pakar (lembaga ini bertugas merancang konstitusi untuk pemerintah baru), ada beberapa pendapat yang bertentangan dikemukakan oleh anggota Majelis tentang masalah ini. Para ulama Sunni, serta beberapa anggota Majelis Pakar Syiah (misalnya, Hassan Azodi) lebih memilih Islam, daripada Islam Syiah, untuk ditetapkan sebagai agama resmi negara tersebut (Vali, 2011, p. 147).

Namun kebijakan mengenai masalah otonomi ini dimunculkan kembali pada saat perang dengan Irak tahun 1980. Strategi ini menyebabkan etnik Kurdi di Iran maupun Iran mendukung kebijakan Iran dan bertempur melawan Saddam. Akhir dari Perang Iran-Irak itu sendiri tidak memberikan kelonggaran bagi etnik Kurdi di dua negara tersebut. Dengan ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh Saddam kini dihapus, Teheran sekarang dapat, sekali lagi, mengalihkan perhatiannya untuk memperkuat rezim dan menargetkan mereka yang terus menantang hegemoni Republik Islam Iran.

Minoritisasi dalam Bidang Politik

Masalah terbesar bagi Kurdi adalah keengganan negara-negara di mana mereka tinggal seperti Iran, Iraq, Turki, dan Suriah untuk memungkinkan mereka mendapatkan otonomi dalam aspek budaya. Meskipun beberapa kelompok Kurdi terus berjuang untuk Kurdistan yang independen, kemungkinan etnik Kurdi hanya akan diizinkan untuk mempertahankan bahasa dan budaya mereka sendiri dalam negara di mana mereka tinggal. Penganiayaan secara budaya maupun agama telah membuat mereka trauma di negara-negara yang mereka tinggali. Konsep satu bangsa dengan satu orang dan satu bahasa seperti yang telah diadopsi oleh pemerintah Turki, telah menyebabkan penindasan besar terhadap etnik Kurdi dalam upaya untuk membuat mereka menyesuaikan diri dengan konsep *nation-state*.

Dalam konteks ini, pengucilan politik atau diskriminasi mengacu pada tindakan pemerintah yang berusaha menahan bagian-bagian tertentu dari masyarakat yang mengacu pada keberpihakan pemerintah terhadap bagian-bagian tertentu dari masyarakat dan memberikan hak istimewa kepada mereka. Pembatasan inilah yang

memunculkan gerakan Kurdi lokal maupun internasional untuk berjuang baik secara diplomatis maupun juga secara provokatif melalui perang untuk memunculkan opsi otonomi ataupun *self-government* yang mana hal inilah yang sangat ditakutkan oleh pemerintah Iran. Karena wilayah Khuzistan di Iran maupun wilayah bekas *Greater Kurdistan* yang terserap menjadi bagian wilayah negara Timur Tengah lainnya seperti Irbil, Kirkuk, dan Sulaymaniya (Iraq) maupun Kobani (Syria) dan Tuncelli (Turki) memiliki cadangan minyak yang belum sepenuhnya di eksplorasi (Akbarzadeh, et al., 2019, p. 1150).

Pengucilan politik yang terjadi di Iran pertama kali terjadi setelah revolusi Islam 1979 yang mana pada saat itu orang-orang Kurdi mulai melakukan protes terhadap pemerintah Iran dengan melakukan pembentengan diri di kota Mahabad, Kirmanshah, dan Sanadaj. Pemerintah Iran mengizinkan *Pasdar* (*Iran Revolutionary Guard*) dan Militan *Basij* untuk menggunakan senjata berat dalam merebut kota-kota tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan Iran yang baru dalam masa transisi. Hal ini tentunya berimbas pada keanggotaan Abdullah Ghasemlou di *Majlis* yang sebelumnya diakui sebagai wakil resmi dari etnik Kurdi di Iran akhirnya dicopot dari keanggotaan *Majlis* sebagai bentuk dari penyingkiran etnik Kurdi atas ketidaksetujuan etnik tersebut (Yildiz & Tayşi, 2007, p. 99).

Diskriminasi ini menyebabkan adanya gerakan separatis Kurdi dalam memperjuangkan statusnya tentang hal politik yang kemudian menyebar ke isu ekonomi, budaya dan keagamaan. Baru pada masa kepresidenan Muhammad Khatami keadaan ini mulai berubah. Banyak Kurdi Iran mendukung gebrakan reformis ketika ia terpilih sebagai presiden Iran pada Mei 1997. Khatami menunjuk Abdollah Ramazanzadeh, seorang Syiah Kurdi, sebagai gubernur jenderal pertama Iran untuk wilayah Kurdistan. Pada gilirannya, Ramazanzadeh menunjuk sejumlah Sunni Kurdi ke posisi penting di pemerintahannya (Tugdar, Serhun Al, 2017, p. 192).

Pada pemerintahan Khatami yang pertama terlihat bagaimana ia berusaha untuk membangun sebuah hubungan yang baru terhadap masyarakat Kurdi. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyaknya penerbitan berbahasa Kurdi yang tumbuh. Pada pemerintahan presiden ini, generasi pertama untuk penerbitan ini yang telah menikmati kebebasan pers masa Khatami terpaksa ditutup secara paksa pada Agustus 2003 karena Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengasumsikan 40 kantor penerbitan Kurdi telah tertutup untuk umum karena berisi ujaran mengutuk dan mempublikasikan berita palsu yang diduga digunakan untuk menggoyang rezim Teheran menggunakan isu-isu kemerdekaan dan otonomi (Neriah, 2012, p. 12).

SIMPULAN

Perjuangan Kurdi untuk menentukan nasib sendiri di Iran menghadapi masalah baru dengan Republik Islam Iran. Kurdi menginginkan otonomi dan demokrasi setelah penggulingan shah Iran, tetapi mereka menemukan diri mereka terasing dari politik Iran. Pada awalnya bersama-sama menggulingkan pemerintahan sebelumnya dengan tujuan memperoleh otonomi pada masa rezim berikutnya, namun pada akhirnya etnik Kurdi mendapatkan diri mereka dalam kesulitan karena otonomi yang mereka inginkan berusaha dikubur jauh oleh rezim baru. Pemberontakan dengan kekerasan di

Kurdistan Iran akan terus menguji stabilitas domestik Iran di wilayah Kurdi. Mengingat berbagai tantangan yang dihadapi Iran di bidang domestik dan regional, bagaimanapun, tidak ada indikasi untuk menyarankan bahwa etnik Kurdi menimbulkan ancaman serius bagi ketahanan keseluruhan rezim. Dalam hal ini, sifat ancaman yang ditimbulkan oleh etnik Kurdi ke Teheran harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih besar dari ketegangan domestik yang bersumber dari perselisihan etno-religius di antara banyak komunitas minoritas etnis dan agama Iran dan pusat-pusat oposisi politik lainnya dengan otoritas Islam yang berkuasa. Turbulensi geopolitik terkait dengan posisi rumit Kurdi di negara-negara tetangga, terutama Irak Syiria dan Turki juga berpengaruh. Walaupun tampaknya Iran belum mengubah pendekatan dasarnya terhadap masalah ini dan efektivitas strategi yang diambil oleh pemerintah tersebut diragukan. tidak ada jalan lain untuk menahan nasionalisme berbasis kesukuan di negara itu selain dengan memberikan kesetaraan semua warga negara terlepas dari etnistas dan bahasa meskipun hal ini telah kehilangan banyak potensi retorikanya. Demokrasi di Iran yang mulai tumbuh berarti negara harus menemukan jalan baru keluar dari *status quo* dan mulai membuka pintu masuknya kelompok minoritas ke dalam semua bidang.

REFERENSI

- Ahmadzadeh, H., & Stansfield, G. (2010). The Political, Cultural, and Military Re-Awakening of the Kurdish Nationalist Movement in Iran. *The Middle East Journal*, 64(1), 11–27. <https://doi.org/10.3751/64.1.11>.
- Akbarzadeh, S., Ahmed, Z. S., Laoutides, C., & Gourlay, W. (2019). The Kurds in Iran: Balancing national and ethnic identity in a securitised environment. *Third World Quarterly*, 40(6), 1145–1162. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1592671>
- Ehteshami, A. (1995). *After Khomeini: The Iranian Second Republic*. New York: Routledge.
- Eppel, M. (2016). *A People Without a State*. Texas: University of Texas Press.
- Koohi-Kamali, F. (2014). *Political Development of the Kurds in Iran: Pastoral Nationalism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kreyenbroek, P. G., & Sperl, S. (2005). *The Kurds: A Contemporary Overview*. <http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=242169>.
- McDowall, D. (2010). *A modern history of the Kurds* (revised). London: I.B. Tauris.
- Neriah, J. (2012). The Future of Kurdistan: Between Turkey, the Iraq War, and the Syrian Revolt, Jerusalem Center for Public Affairs. Retrieved from <http://jcpa.org/article/the-future-of-kirdistan-between-turkey-the-iraq-war-and-the-syrian-revolt>.
- Reisinezhad, A. (2018). *The Shah of Iran, the Iraqi Kurds, and the Lebanese Shia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Romano, D. (2006). *The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization and Identity*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511616440>
- Romano, D., & Gurses, M. (Eds.). (2014). *Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, and Syria* (First edition). New York Palgrave Macmillan.

- Taucher, W., Vogl, M., Webinger, P., Schahbasi, A., Schrott, T., & Österreich (Eds.). (2015). *The Kurds: History, religion, language, politics*. Austria: Federal Ministry of the Interior.
- Tugdar, Serhun Al, E. E. (2017). *Comparative Kurdish politics in the Middle East: Actors, ideas, and interests*. New York: Palgrave Macmillan.
- Vali, A. (2011). *Kurds and the state in Iran: The making of Kurdish identity*. I.B. Tauris.
- Yildiz, K., & Tayşi, T. B. (2007). *The Kurds in Iran: The past, present and future*. London: Pluto Press.